

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembangunan Industri

1. Pengertian Industri

Istilah industri secara ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan disini dapat dilakukan secara manual dengan mesin maupun secara elektronik. Istilah industri dapat pula diartikan sebagai himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, dimana kata Industri dirangkai dengan kata yang menerangkan jenis industrinya. Misalnya, industri obat-obatan, industri garmen, industri perkayuan, dan sebagainya.¹

Industri dari segi industri itu sendiri merupakan hak milik pribadi *private property*. Sebab industri merupakan barang yang bisa di miliki secara pribadi. Telah diriwayatkan, bahwa banyak individu telah memiliki industri dimasa Rasulullah SAW, seperti industri

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 156.

sepatu, pakaian, pedang dan lain sebagainya. Rasul pun mengakui kebolehnya. Hanya saja barang-barang yang di produksi oleh industri itulah yang merubah status industri tersebut, mengikuti hukum barang produksinya.²

Industri bisa diartikan sebagai suatu tempat atau lokasi dimana aktivitas produksi akan diselenggarakan, sedangkan aktivitas produksi bisa dinyatakan sebagai sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk mengubah suatu kumpulan masukan (*human resources, materials, energy, informasi* dan lain-lain) menjadi produk keluaran (*finished product atau service*) yang memiliki nilai tambah.³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri sebagai suatu unit usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, setengah jadi atau menjadi jasa dan memiliki catatan administrasi mengenai produksi atau

² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 251.

³ Sritomo Wignjosebroto, *Pengantar Teknik dan Manajemen Industri* (Surabaya: Guna Widya, 2006), 2.

biaya yang menggunakan modal serta tenaga kerja sehingga mempunyai nilai tambah.

Industri mempunyai dua pengaruh yang penting dalam setiap program pembangunan. Pertama, dalam model dua sekornya lewis, produktivitas yang lebih besar dalam industri merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kedua industri pengolahan (*manufacturing*) memberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar bagi industri substitusi impor (ISI) untuk lebih efisien dan meningkatkan ekspor dari pada hanya berkuat pada pasar “primer” saja.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, menyebutkan bahwa Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2015), 452.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa industri merupakan segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam mengenai pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi untuk kebutuhan manusia, dimana barang yang dihasilkan industri nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

Pembangunan industri tidak sebatas hanya untuk mengolah bahan baku menjadi setengah jadi atau barang jadi saja, akan tetapi banyak tujuan lain dengan adanya pembangunan industri. Sebagaimana menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, bahwa pembangunan industri bertujuan untuk.⁵

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta

⁵ Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian diakses 06/07/2016 Pkl 09:34 wib

dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.

- e. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- g. Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Dari uraian di atas bahwa tujuan dari adanya pembangunan industri sangat penting bagi masyarakat dan negara, adanya pembangunan industri tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran saja akan tetapi masih banyak tujuan lain

seperti meningkatkan pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan devisa, dan menunjang serta memperkuat stabilitas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan sosial.

2. Jenis-jenis Industri

Jumlah dan jenis-jenis industri berbeda-beda untuk setiap daerah atau Negara tergantung pada sumber daya yang tersedia. klasifikasi industri berdasarkan sifat bahan mentah dan sifat produksinya, industri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu

- a. Industri Primer, yaitu industri-industri yang mengolah bahan mentah hasil produksi sektor primer baik dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan. Industri ini pada umumnya lebih berorientasi kepada bahan mentah dan di tempatkan.
- b. Industri Sekunder, yaitu industri-industri yang mengolah lebih lanjut hasil – hasil industri lain (industri primer) bahan bakunya adalah barang jadi

atau setengah jadi yang diproduksi industri lain. Pada umumnya ditempatkan berdekatan dengan industri-industri yang menghasilkan bahan bakunya.⁶

Klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu:

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang
- b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang
- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang
- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.⁷

⁶ Dimas Bagus Ananta, "Pengaruh Keberadaan Industri Sirup Jeruk Nipis Peras Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan," Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014, h.11

⁷ Daud Sajo Geografi, Klasifikasi Industri, 2015, (<http://www.KlasifikasiIndustri.html>), diakses 25/08/2016 Pkl 15:56 wib

3. Teori Lokasi Industri

Penempatan lokasi industri mempunyai peranan yang sangat penting, sebab akan mempengaruhi perkembangan dan kontinuitas proses dan kegiatan industri itu sendiri, lokasi industri dalam hal ini kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, jadi diputuskan berdasarkan berbagai macam orientasi, menurut Djamaris (dalam Melly Nurmiladiyah) membagi pemilihan lokasi menjadi golongan yaitu:⁸

- a. Industri yang berorientasi kepada bahan mentah (*Raw Materials Oriented Manufactures*).
- b. Industri yang berorientasi kepada pasaran (*Market Oriented Manufactures*).
- c. Industri yang berorientasi kepada tenaga kerja (*Labour Oriented Manufactures*).

⁸ Melly Nurmiladiyah, "Pengaruh Keberadaan Industri Batu Alam Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja Di Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka," Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014, h.27

d. Industri yang berorientasi kepada sumber tenaga/energi (*Power Oriented Manufactures*).

Penyebaran lokasi industri ke daerah – daerah mempunyai arti penting bagi pembangunan daerah yang dijadikan lokasi industri, potensi yang ada dapat terolah dan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya, baik itu potensi manusia maupun potensi alam, seperti yang dikemukakan oleh Djamari (dalam Dimas Bagus Ananta) yang mengemukakan:

Faktor – faktor yang bermacam – macam itu biasanya berinteraksi satu sama lain tetapi suksesnya suatu industri biasanya bukan karena semua faktor itu ada secara lengkap dan optimum pada suatu wilayah. Tetapi dari sekian banyak faktor – faktor itu ada sebagian faktor yang dominan, yang sangat menentukan, sehingga suatu industri ditempatkan di tempat tertentu.⁹

⁹ Dimas Bagus Ananta, “Pengaruh Keberadaan Industri Sirup Jeruk Nipis Peras Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan,” Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014, h.17

Dalam teori weber, faktor yang mempengaruhi lokasi industri yaitu biaya angkutan dan tenaga kerja yang merupakan faktor regional yang bersifat umum dan faktor deglomerasi yang bersifat lokal dan khusus. Sehingga dalam teori weber tersebut biaya angkutan dianggap sebagai penentu utama lokasi industri biaya produksi tidak dianggap menentukan secara langsung, akan tetapi lebih dilihat sebagai fungsi berat yang diangkut dan jarak yang ditempuh.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menunjang dalam keberadaan suatu industri, namun biasanya ada faktor yang lebih dominan lainnya yang dapat menentukan dimana suatu industri ditempatkan. Lokasi industri sangat menentukan keberhasilan suatu industri, karena dalam penentuan lokasi industri, gejala – gejala geografi suatu daerah harus mempunyai kemampuan sebagai penunjang kegiatan industri tersebut, selain harus memperhatikan unsur

tenaga kerja, bahan mentah, pasaran, dan pengembangan wilayah.

4. Kebijakan Industri Strategis dalam Islam

Berkaitan dengan industri strategis, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan oleh Negara dalam ekonomi Islam. *Pertama*, jika jenis industri strategis dari sisi produknya termasuk dalam kategori kepemilikan umum atau dari sisi bahan baku dan sarana-sarana yang digunakannya merupakan barang-barang kepemilikan umum maka industri strategis tersebut merupakan milik umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan oleh negara. Industri strategis yang termasuk kepemilikan umum seperti pembangkit listrik, pertambangan minyak bumi dan gas, pengolahan dan penyaluran air bersih, pabrik pengolahan barang tambang, penyedia jasa telekomunikasi yang memanfaatkan sarana- sarana milik umum misalnya jalan raya maupun lautan untuk memasang kabel, tidak boleh diberikan kepemilikan dan pengelolaannya kepada individu atau swasta, sehingga jenis

industri strategis yang seperti ini tidak boleh diprivatisasi oleh negara. Justru jika ada swasta yang memiliki jenis industri strategis yang termasuk kepemilikan umum, maka negara harus mengambalikannya dengan memberikan ganti rugi yang wajar kepada swasta tersebut.¹⁰

Kedua, jika jenis industri strategis termasuk dalam kategori suatu sarana atau peralatan yang diwajibkan oleh syara' untuk diadakan oleh negara maka negara harus memiliki dan mengembangkan industri tersebut agar negara menjadi mandiri, kuat dan mampu melayani rakyatnya.

Meskipun demikian, hal ini tidak memposisikan industri strategis dalam golongan ini mutlak masuk dalam kategori kepemilikan umum. Bisa saja industri kategori ini dimiliki individu selama karakteristik dan produk yang dihasilkan industri tersebut tidak termasuk kepemilikan umum. Misalnya industri otomotif, industri pesawat terbang tidak termasuk kepemilikan umum sehingga swasta boleh

¹⁰ Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).42-45

memilikinya. Hanya saja industri- industri strategis tersebut memerlukan modal yang besar dan pengorganisasian yang kuat dan negaralah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membangunnya.

Strategi industri strategis dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syariah (al-maqashid as-syar'iyah) antara lain memelihara keturunan, akal, kemuliaan, jiwa, harta, agama, keamanan, dan negara. Karena itu, negara berkewajiban membangun dan menguasai industri strategis yang memang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat.

Industri strategis yang termasuk dalam kepemilikan umum maka otomatis negara harus membangun dan mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Juga industri strategis yang karena sebab-sebab tertentu syara' mewajibkan negara untuk memproduksinya, seperti industri militer dan pertahanan, industri telekomunikasi, industri otomotif, industri pesawat terbang dan ruang

angkasa, industri perkapalan, industri baja dan lain-lainnya.

Dibangunnya industri-industri tersebut dalam rangka pertahanan dan keamanan negara termasuk demi tersebarnya risalah Islam, terlayannya berbagai kebutuhan masyarakat dengan adanya fasilitas umum, terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, sekunder dan tersier setiap anggota masyarakat dengan tersedianya produk-produk industri baik berupa peralatan maupun barang-barang konsumtif.

Penguasaan atas industri strategis yang notabene merupakan basisnya industri atau industri yang dapat menghasilkan industri lainnya, membawa keuntungan yang besar bagi negara dan masyarakat. *Pertama*, kita tidak tergantung lagi kepada bangsa asing sehingga tidak dapat didikte dan dijajah oleh negara-negara Kapitalis. Kedua, kepemilikan atas industri- industri strategis akan membuat biaya produksi industri strategis itu sendiri dan industri turunannya menjadi lebih efisien karena pihak asing tidak

dapat mempermainkan kita lagi. Keadaan ini juga menyebabkan harga produk industri yang dijual ke masyarakat menjadi lebih murah. Kebijakan seperti inilah yang seharusnya ditempuh pemerintah jika memang berniat untuk mandiri dan mensejahterakan rakyat, bukannya melikuidasi dan memprivatisasi industri strategis yang sudah dimiliki.

5. Sejarah Sektor Industri di Indonesia

Pada tahun 1920-an industri-industri modern di Indonesia hampir semua dimiliki oleh orang asing, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, pembuatan gula merah (tebu dan nira), rokok kretek, kerajinan tekstil, dan sebagainya yang tidak terkoordinasi dengan baik.¹¹

Perusahaan besar yang modern hanya ada dua buah yaitu pabrik rokok milik *British American Tobacco (BAT)* dan perakitan kendaraan bermotor *General Motor*

¹¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 157-159

Car Assembly. Depresi ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1930-an telah meruntuhkan perekonomian, yang mengakibatkan menurunnya penerimaan ekspor dari 1.448 *Golden* menjadi 505 *Gulden* (1929) sehingga mengakibatkan pengangguran. Melihat situasi tersebut pemerintah Hindia Belanda mengubah sistem dan pola kebijakan ekonomi dari sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian ijin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Menurut sensus industri pertama (1939), industri yang ada ketika itu mempekerjakan 173 ribu orang yang bergerak di bidang pengolahan makanan, tekstil dan barang-barang logam, semuanya milik asing. Meskipun sumber dan struktur investasi tidak terkoordinasi dengan baik, tetapi investasi di Indonesia pada tahun 1937 lebih kurang US \$ 2.264 juta, di mana lebih dari setengahnya di miliki oleh sektor swasta. Dari jumlah tersebut Belanda memiliki andil 63%, Inggris 14%, Cina 11%, dan Amerika 7%.

Pada masa perang dunia II kondisi industrialisasi cukup baik. Namun setelah pendudukan Jepang keadaannya menjadi berbalik. Hal ini karena ada larangan impor bahan mentah, dan di angkutnya barang-barang kapital ke Jepang dan pemaksaan tenaga kerja (Romusha) sehingga investasi asing praktis nihil. Setelah Indonesia merdeka mulai mengembangkan sektor industri dan menawarkan investasi walaupun masih dalam taraf coba-coba. Pada tahun 1951 pemerintah meluncurkan RUP (Rencana Urgensi Perekonomian). Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil pribumi, dan memberlakukan pembatasan-pembatasan untuk industri besar atau modern yang baik dimiliki oleh orang Eropa dan Cina.

Kebijakan ini menyebabkan investasi asing berkurang, namun telah memacu tumbuh suburnya sektor bisnis kalangan pribumi, kendati relatif kecil menyadari situasi demikian, pemerintah membuat kebijakan yang menitikberatkan pengembangan industri-industri yang

dijalankan dan dimiliki oleh pemerintah. Sesudah tahun 1957 sektor industri mengalami stagnasi, dan perekonomian mengalami masa redup. Sepanjang tahun 1960-an sektor industri praktis tidak berkembang. Selain karena masalah politik, juga karena kelangkaan modal, tenaga kerja ahli, dan terampil. Pada masa itu kondisi perekonomian benar-benar dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan menurunnya PDB, kecilnya sektor industri (kurang dari 10%), dan tingginya angka pengangguran. Sektor industri pada saat itu didominasi industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik super-fosfat di Cilacap.

Keadaan demikian diwariskan pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru yang kemudian mengubah pola kebijakan ekonomi yang demikian kompleks dengan menatanya kembali. Kebijakan tersebut, antara lain mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan pemberlakuan undang-undang dalam bidang penanaman

modal (PMA tahun 1967 dan PMDN tahun 1968) mampu membangkitkan gairah sektor industri. Mulai tahun 1978 sumbangan sektor industri dalam membentuk PDB kembali menembus angka 10%. Dan peranan sektor industri ini terus meningkat sepanjang PJP I hingga terjadinya badai krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang lalu.

Pada tahun 1999 hampir jenis semua industri di Indonesia mengalami kemunduran bahkan ada yang terpaksa harus tutup karena pailit. Hal ini termasuk juga perusahaan-perusahaan bidang perkebunan juga mengalami penurunan, kecuali perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau yang mengalami peningkatan. Luas tanaman dan produksi karet pada tahun 1999 menurun sebesar 1,13% dan 8.03%.¹²

6. Awal Pertumbuhan Industri di Indonesia

Industri kerajinan tangan telah lahir di Indonesia jauh sebelum Belanda menguasai Kepulauan Nusantara.

¹² Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 157-159

Pada abad pertengahan usaha kerajinan tangan tumbuh bergandengan dengan upacara-upacara adat dan sangat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Pangan dan sandang merupakan dua kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan.

Hal ini menyebabkan kegiatan pemintalan dan pertenunan berkembang lebih awal dari usaha kerajinan lainnya. Sebelum tanaman kapas diperkenalkan di Indonesia, penduduk telah menggunakan berbagai jenis bahan baku untuk membuat sandang antara lain serat tanaman, kulit kayu, kulit binatang dan lain-lain. Usaha kerajinan sandang ini tidak hanya terdapat di daerah tertentu saja tetapi juga di daerah terpencil misalnya di pedalaman Sumatera, ditengah belantara Kalimantan, di kaki bukit Sulawesi atau Maluku.

Masyarakat terpencil menggunakan kulit kayu sebagai bahan utama pembuat sandang. Kulit tersebut dipukul-pukul sampai rata dan tipis, selanjutnya direndam di dalam sejenis cairan agar menjadi lemas dan tidak

kaku. Sandang yang lebih halus dibuat dari tumbuhan yang mempunyai serat panjang seperti tanaman *abaca* atau tanaman *musa textilis*.

Selanjutnya pada abad ke-7 kapas mulai diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Cina yang dibawa Vietnam ke Asia Tenggara.

Disebutkan bahwa antara abad ke 13 – 17, pedagang Cina membeli benang dan kain katun dari berbagai pelabuhan Asia Tenggara seperti Vietnam, Luzon dan Pulau Jawa.

Pada abad ke 16 tekstil sutera mulai berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Kain sutera tersebut dibuat dari serabut kepompong yang dihasilkan dari kelenjar ulat sutera yang diludahkan pada daun murbei dan menjadi benang sutera.¹³

7. Permasalahan Industrialisasi di Indonesia

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia termasuk Negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah India

¹³ Bisuk siahaan, *Industrialisasi di Indonesia* (Bandung: ITB, 2000), 1-2.

dan Cina. Namun di luar dari segi industrialisasi Indonesia dapat dikatakan baru mulai merangkak. Salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam GDP (*Groos Domestic Product*) yang masih relatif kecil. Dari ukuran ini sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan di bandingkan dengan Negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambah perkapita.

Dari segi ukuran mutlak sektor industri di Indonesia masih sangat kecil, bahkan kalah dengan Negara-negara kecil seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Secara perkapita nilai tambah sektor industri di Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia. Indikator lain tingkat industrialisasi adalah produksi listrik perkapita dan persentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Di Indonesia produksi listrik perkapita sangat rendah, dan dari tingkat yang rendah ini hanya sebagian kecil yang digunakan oleh konsumen industri.

Keadaan sektor industri selama tahun 1950-an dan 1960-an pada umumnya tidak menggembirakan karena iklim politik pada waktu itu yang tidak menentu. Kebijakan perindustrian selama awal tahun 1960-an mencerminkan filsafat proteksionisme dan etatisme yang ekstrim, yang mengakibatkan kemacetan dalam memproduksi. Sehingga sektor industri praktis tidak berkembang (stagnasi). Selain itu, terjadinya kemacetan produksi juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga kerja ahli yang memadai.

Perkembangan sektor industri mengalami kemajuan yang cukup mengesankan pada masa PJP I, hal ini dapat di lihat dari jumlah unit usaha, tenaga kerja yang dapat diserap, nilai keluaran yang dihasilkan, sumbangan devisa dan kontribusi pembentukan PDB, serta tingkat pertumbuhannya yang cukup menakjubkan, sampai terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998.

8. Kebijakan Industrialisasi

Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Keadaan

semakin baik dengan berhasilnya kebijakan stabilitas di tingkat makro dan dilaksanakannya kebijakan di berbagai bidang, ada tiga aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Ketiga aspek tersebut adalah:

- Dirombaknya sistem devisa. Sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana.
- Dikurangnya fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan Negara, dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN.
- Diberlakukannya UUD penanaman modal asing (PMA).

Sebagai akibat kebijakan ini, Indonesia membuka kemungkinan pertumbuhan industri dengan landasan yang luas. Sehingga pada tahun 1970 industri-industri utama sektor modern meningkat dengan pesat. Akibatnya sektor industri dalam pembentukan GDP

meningkat dari 9% menjadi 12% pada tahun 1977, yang dibarengi dengan menurunnya sektor pertanian dalam pembentukan GDP.¹⁴

9. Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan

Peran sektor industri dalam pembangunan adalah untuk memberikan nilai tambah faktor-faktor produksi. Pada dasarnya peranan sektor industri dalam pembangunan ini dikembangkan menjadi strategi industrialisasi yang meliputi strategi industri (SISI) atau *import substitution* dan strategi industri promosi ekspor (SIPE) atau *export promotion*.

SISI dikenal pula dengan istilah strategi orientasi ke dalam (*inward looking strategy*), yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan barang-barang untuk menggantikan kebutuhan akan barang-barang impor produk-produk sejenis. Sedangkan SIPE atau sering disebut dengan istilah strategi orientasi keluar (*outward*

¹⁴ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 159-160.

looking strategy), strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan berbagai jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk di ekspor.

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang dalam pembentukan PDB Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991 sektor industri ini mampu menjadi sektor utama (*Leading sector*) dengan mengalahkan peran sektor pertanian dalam menyumbang pembentukan PDB. Sebagai gambaran pada tahun 1999 peran sektor industri pengolahan mencapai lebih dari seperempat (25,8%) komponen dalam pembentukan PDB. Sementara sektor pertanian hanya mampu menyumbang sebesar 19,4 %. Untuk sektor pertanian angka ini pun lebih rendah dibandingkan dengan sumbangan dari industri non migas (23,3%) di Indonesia, industri dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri

kecil, dan industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan teknologi industri yang digunakan.¹⁵

B. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

¹⁵ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 162-163.

Kemiskinan merupakan kata yang amat sulit didefinisikan. Menurut istilah yang paling sederhana, miskin berarti keadaan orang yang mempunyai pendapatan yang amat rendah. Kamus merumuskan istilah itu hanya sebagai “tidak memiliki uang atau kekayaan materil.”¹⁶

Salah satu pengukur distribusi pendapatan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan (*poverty rate*) adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolute yang dinamakan garis kemiskinan (*poverty line*).¹⁷

Kekayaan yang diwarisi merupakan faktor kecil dan sebagian besar mengandalkan upah dan gaji, karena kesenjangan pendapatan sebenarnya merupakan masalah mendasar dalam kemiskinan, terutama di Negara berkembang.¹⁸

¹⁶ Case & Fair, *Prinsip-prinsip ekonomi mikro*, (Jakarta : Indeks kelompok Gramedia, 2007), 422.

¹⁷ N. Gregory Mankiw, Euston Quah dan peter Wilson, *Pengantar ekonomi mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 413.

¹⁸ Tom Gorman, *The Complete ideal's Guides Economics*, (Jakarta : Prenada, 2009), 183.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.¹⁹

Selain itu dimensi-dimensi kemiskinan juga saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita

¹⁹ Nunung Nurwati, “Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan”, Vol X, No. 1, (Januari,2008), 1.

sering mendengar istilah kemiskinan perdesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun, hal tersebut bukan berarti hanya “desa” atau “kota” nya yang mengalami kemiskinan (kemiskinan “desa” atau “kota” salah satunya diindikasikan oleh pendapatan daerah yang begitu rendah), namun juga orang-orang atau penduduk (Manusianya) yang menderita kemiskinan.

Disisi lain, kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk

berobat. Orang miskin itu umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.²⁰

Menurut kuncoro kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut sama dengan yang dikatakan Friedmann bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya.

Akan tetapi, Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai

²⁰ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), 299.

untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Ensiklopedia Internasional Meriam Webster mendefinisikan “*Poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money*” (kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang), sedangkan World Bank menyatakan “*Proverty is pronounced deprivation in wellbeing.*” (kemiskinan adalah istilah untuk kekurangan dalam kesejahteraan).

Narayan mendefinisikan kemiskinan ialah ketiadaan aset/kekayaan dan kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam ranah politik dan akuntabilitas.

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.²¹

2. Macam-Macam Bentuk Kemiskinan

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal,

²¹ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: Rosda, 2015), 2.

ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan dibagi menjadi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari luar.

- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering sekali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak di akibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.²²

²² Fatkhul Mufid Cholili, Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Adapun Menurut Houghton dan Kandker ada empat elemen karakteristik penyebab kemiskinan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

<p>Karakteristik Regional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terisolasi terpencil termasuk didalamnya buruknya infrastuktur dan tertinggal sehingga tidak mampu mengakses pasar dan pelayanan publik ➤ Sumber daya alam termasuk didalamnya kemampuan lahan dan kualitas tanah. ➤ Cuaca termasuk iklim, kondisi lingkungan dan lainnya. ➤ Tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen.
<p>Karakteristik Komunitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infrastuktur (air bersih, jalan, listrik dan lainnya). ➤ Distribusi lahan. ➤ Akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lainnya). ➤ Struktur sosial dan modal sosial.
<p>Karakteristik Rumah Tangga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ukuran rumah ➤ Rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum kerja). ➤ Jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia dini. ➤ Asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah, dan perhiasan dan lainnya).

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pekerjaan dan <i>income</i>. ➤ Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.
Karakteristik Individu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usia. ➤ Pendidikan. ➤ Status perkawinan. ➤ Suku atau daerah.

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh coombs menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan dan (3) pekerjaan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah.²³

4. Ciri-Ciri Kemiskinan

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat di pakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam

²³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 4-5

mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan yaitu:

- a. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar.
- d. Banyak diantara mereka yang tinggal didaerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill.²⁴

²⁴ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), 5-6.

5. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan

Indikator nasional dalam menghitung jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan oleh standar hidup dari badan pusat statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Penetapan nilai standar hidup minimum ini digunakan untuk membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin.

Sementara indikator kemiskinan lain yang sering digunakan dan telah memiliki rasionalisasi yang banyak dipercaya oleh sebagian lembaga pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera. Disebut keluarga prasejahtera apabila tidak bisa memenuhi beberapa syarat indikator

dan sementara yang disebut keluarga sejahtera dapat memenuhi semua indikator tersebut. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang baik.
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e. Semua anak umur 7-15 tahun bersekolah.

Indikator kemiskinan yang telah disebutkan di atas, dapat dijadikan panduan dalam rangka menangani masalah kemiskinan. Meskipun dari masing-masing indikator tersebut memiliki cara pandang yang berbeda-beda berdasarkan

kepentingan program dari masing-masing lembaga.²⁵

6. Pandangan Islam Terhadap Persoalan Kemiskinan

Kata *faqru* (kemiskinan), menurut bahasa maknanya adalah *ihtiyaj* (membutuhkan) Kata *faqru* adalah bentuk masdar, lawan kata dari *ghaniyu*. Hal ini karena bisa saja seseorang membutuhkan sesuatu, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Sedangkan kata *faqir*, menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya yang tidak bisa dimintai apa-apa.²⁶

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang,

²⁵ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 7-8.

²⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 228.

pangan, dan papan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

(البقره : ٢٣٣)

"Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf". (QS. Al-Baqarah : 233).²⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق : ٦)

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....." (QS Ath-Thalaaq : 6).²⁸

Tidaklah pernah Islam memandang kemelaratan sebagai suatu kehinaan yang menurunkan derajat orangnya. Islam mengambil ukuran bahwa manusia yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang paling

²⁷ Anggota Ikatan Penerbit Indonesia Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : Cv Diponegoro, 2000)

²⁸ Anggota Ikatan Penerbit Indonesia Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

berbakti. Dengan demikian, orang-orang miskin yang bagaimanapun melaratnya mungkin lebih tinggi derajatnya dari mereka yang banyak hartanya dan hidup dalam kemegahannya.

Inilah bantuan pertama dari Islam terhadap orang-orang miskin, kemudian Islam memperhatikan nasib mereka. Ada orang yang melarat karena lemahnya tenaga dari bekerja dan ada pula yang jatuh melarat karena tidak ada jalan untuk mencari penghidupan.

Adapun terhadap orang yang lemah karena penyakit yang sukar mengobatinya, Islam menjadikan usaha bantuan baginya suatu kewajiban atas seluruh masyarakat, bukan hanya sokongan dan derma yang boleh dilengahkan.

Adapun orang yang tidak mempunyai alat untuk mengusahakan dirinya, Islam mewajibkannya menyediakan alat-alat yang dibutuhkan tersebut. Islam sangat membenci sifat yang meminta-minta (mengemis) dan memerintahkan supaya tiap-tiap muslim untuk

menjauhinya, sebab tangan diatas yang memberi lebih baik dari pada tangan dibawah yang menerima (meminta).²⁹

Dalam pengentasan kemiskinan ini diperlukan juga motivasi dan etos kerja personal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan. Secara personal, manusia harus menyadari bahwa untuk bisa lepas dari kemiskinan itu adalah dirinya sendiri, sebab sebegus apapun program dan berapapun besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan, kalau manusianya enggan atau tidak memiliki kemauan untuk lepas dari kemiskinan maka tidak akan pernah lepas. Karena Allah swt tidak akan merubah keadaan suatu kaum (seseorang) kalau seseorang itu tidak mau merubahnya sendiri.

Pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan sinergitas peran antara pemerintah, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehensif dari

²⁹ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), 222.

berbagai unsur yaitu pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan. Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.³⁰

Ajaran agama Islam menetapkan peran personal manusia untuk selalu berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan dengan tetap berpegang teguh

³⁰ Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 255.

pada ajaran Islam dalam artian bukan menghalalkan segala cara agar terlepas dari kemiskinan yang membelenggu mereka. Islam mengajarkan bahwa bekerja adalah sesuatu yang harus dilakukan, bukan dengan memintaminta atau mengemis kepada pihak lain. Karena mencari dan memberi lebih baik dari menerima (tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah).

Kemudian untuk mengurangi kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial, ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, artinya manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, bukankah nenek moyang kita nabi Adam As, hidup sendiri dengan semua fasilitas lengkap dari Allah swt di surga, tetapi beliau juga tidak dapat hidup sendiri, apa lagi kita dengan keterbatasan yang kita miliki. Sikap ini ditunjukkan oleh kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, sebagai upaya pemerataan ekonomi secara adil.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil dua penelitian terdahulu sebagai perbandingan pada penelitian ini. Penulis fokus pada industrialisasi dan kemiskinan dalam penelitian sebelumnya. Karena penulis mengetahui hasil penelitian terdahulu, maka penulis dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisa'us solihah dari Uin Smh Banten 2017 yang berjudul Pengaruh Jumlah industri besar dan sedang terhadap pengangguran dengan variabel penyerapan tenaga kerja sektor industri sebagai variabel intervening di Provinsi Banten tahun 2010-2014. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi pustaka yang didapatkan dari buku-buku literatur serta jurnal-jurnal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

jumlah industri terhadap pengangguran di Provinsi Banten sebesar 8,183 dilihat dari nilai T hitung.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh zulfah hafidzah dari Uin Smh Banten 2017 yang berjudul pengaruh tingkat kemiskinan dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten 2010-2015. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu studi eksperimental. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan analisis data yang digunakan adalah uji F, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan analisis regresi linear berganda.

Dalam penelitian tersebut menyimpulkan variabel kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi (r) diperoleh sebesar 0.641 terletak pada interval koefisien 0.60 – 0.799 yang berarti tingkat hubungannya kuat. Sedangkan uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,410 , artinya bahwa variabel kemiskinan dan pengangguran berpengaruh

signifikan dan pengaruhnya sebesar 41 % terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja.³¹ Atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.³²

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran itu akan dibuktikan melalui data yang dikumpulkan. Hipotesis ini akan di uji oleh penulis sendiri sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah adanya pengaruh industrialisasi dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh

³¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 70.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 26.

industrialisasi dalam mengentaskan kemiskinan, penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak adanya pengaruh industrialisasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Cikande.

H_a : Adanya pengaruh industrialisasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Cikande.

Berdasarkan pernyataan penulis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh industrialisasi dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Tahun 2010-2015.